



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hubungan Antara Tingkat Kelahiran Terhadap Dinamika Kependudukan di Kota Malang: Implikasi pada Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran

Mahendra Pramuditya Putranto¹, Ifan Deffinika^{2*}

¹Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia, mahendra.pramuditya.21072261@students.um.ac.id

²Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

*Corresponding Author: mahendra.pramuditya.21072261@students.um.ac.id

Abstract: *The high birth rate has a direct impact on population dynamics, including an increase in population, infrastructure needs, and public services. The birth certificate must be documented as part of administrative requirements to handle population information accurately and effectively. This study will investigate the relationship between birth rates and population dynamics in Malang, as well as its implications for regulatory regulations on birth certificates. This study uses a quantitative approach with analytical descriptive methods. This method aims to define and analyze the relationship between birth rates and population dynamics in Malang City, as well as the consequences of regulations on recording birth certificates. Overall, this analysis shows that the relationship between birth rates and population dynamics has significant consequences on regulations on recording birth certificates. By improving the civil registration system through a more integrated and evidence-based approach, Malang City can overcome existing challenges and support more inclusive and sustainable development.*

Keywords: *Population Growth, Birth Rate, Civil Registration*

Abstrak: Tingginya angka kelahiran berdampak langsung pada dinamika kependudukan, termasuk peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan infrastruktur, dan pelayanan publik. Akta kelahiran harus didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan administratif untuk menangani informasi kependudukan secara akurat dan efektif. Studi ini akan menyelidiki hubungan antara angka kelahiran dan dinamika penduduk di Kota Malang, serta implikasinya terhadap peraturan pencatatan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menganalisis hubungan antara angka kelahiran dan dinamika kependudukan di Kota Malang, serta konsekuensinya terhadap peraturan pencatatan akta kelahiran. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara angka kelahiran dan dinamika penduduk memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap peraturan pencatatan akta kelahiran. Dengan memperbaiki sistem pencatatan sipil melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti, Kota Malang dapat mengatasi tantangan yang ada dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Penduduk, Angka Kelahiran, Pencatatan Akta Kelahiran

PENDAHULUAN

Tingginya angka kelahiran di Kota Malang memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika kependudukan dan perkembangan kota. Dalam beberapa dekade terakhir, Kota Malang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat akibat kombinasi antara angka kelahiran yang tinggi dan arus migrasi dari daerah sekitar. Peningkatan populasi ini memberikan tekanan besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk infrastruktur, layanan publik, lingkungan, serta sistem administrasi kependudukan. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada kepadatan penduduk, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (*Saputra & Rahman, 2023*). Lebih lanjut, peningkatan kebutuhan pelayanan publik, seperti pendidikan (termasuk akses ke sekolah berkualitas dan jumlah guru yang memadai), kesehatan (termasuk fasilitas kesehatan primer dan sekunder, tenaga medis, dan obat-obatan), dan keamanan (termasuk penegakan hukum dan layanan darurat), juga meningkat secara signifikan, membutuhkan peningkatan anggaran dan sumber daya manusia yang substansial (*Prasetyo & Hamudy, 2016*).

Pertumbuhan populasi berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan layanan publik. Sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan meningkatnya jumlah siswa yang perlu mendapatkan akses ke sekolah yang berkualitas. Ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas pembelajaran. Begitu pula dengan sektor kesehatan, yang membutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih banyak dan tenaga medis yang mencukupi untuk menangani lonjakan jumlah penduduk. Jika peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan fasilitas layanan publik, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar, menyebabkan kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan dasar mengalami penurunan kualitas hidup (*Agustina et al., 2019*).

Urbanisasi yang pesat akibat meningkatnya angka kelahiran dan arus migrasi turut membawa dampak pada tata ruang kota dan keberlanjutan lingkungan. Kota Malang sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memicu persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh pekerjaan dan tempat tinggal, yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan memperparah ketimpangan sosial ekonomi. Di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan ketidakstabilan sosial akibat tingginya kesenjangan antara kelompok masyarakat ekonomi atas dan bawah (*Ziegenhain, 2021*).

Tingginya angka kelahiran di Kota Malang juga berdampak pada struktur umur penduduk dan rasio ketergantungan. Populasi yang didominasi oleh kelompok usia muda dapat meningkatkan beban ekonomi bagi kelompok usia produktif, terutama jika lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk menampung jumlah angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahunnya. Menurut penelitian Firman (2016), negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan dinamika populasi yang terus berkembang. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang lebih luas.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dinamika kependudukan adalah pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen hukum yang memberikan identitas resmi bagi seseorang serta menjadi dasar dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, masih banyak penduduk Kota Malang yang belum memiliki akta kelahiran akibat berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan geografis, dan birokrasi yang kompleks (*Bennouna et al., 2016*). Rendahnya cakupan pencatatan kelahiran menjadi masalah serius karena dapat menghambat

perencanaan pembangunan yang efektif. Data demografi yang tidak akurat dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam alokasi anggaran dan penyediaan layanan publik, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan cakupan pencatatan kelahiran melalui berbagai kebijakan, seperti program *Sistem Administrasi Kependudukan Online (SIK)* yang memungkinkan pendaftaran kelahiran secara daring. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi dan memastikan bahwa semua anak yang lahir mendapatkan identitas resmi sejak dini (Bennouna et al., 2016). Pencatatan akta kelahiran yang akurat dan efisien menjadi krusial untuk pengelolaan data demografi yang efektif, guna mendukung perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan (Novian, 2018). Data yang akurat memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi dan merespon perubahan demografis dengan lebih baik, meminimalisir dampak negatif pertumbuhan penduduk yang cepat dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (Yudhiantara et al., 2023). Kajian ini akan menganalisis keterkaitan antara angka kelahiran dan dinamika jumlah penduduk di Kota Malang, serta dampaknya terhadap peraturan dan implementasi pencatatan akta kelahiran, termasuk efisiensi birokrasi dan aksesibilitas layanan, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Kholiq & Wiyani, 2022). Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan sipil.

Implikasi dari angka kelahiran yang tinggi terhadap kebijakan pencatatan akta kelahiran menuntut adanya reformasi dalam sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien dan inklusif. Digitalisasi sistem pencatatan kependudukan menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pencatatan kelahiran. Implementasi aplikasi berbasis mobile dan pendaftaran daring dapat membantu mengurangi birokrasi serta mempercepat proses pencatatan, sehingga lebih banyak penduduk yang dapat terdaftar dalam sistem kependudukan secara resmi (Hutasoit, 2023). Tingkat kelahiran yang tinggi memiliki implikasi luas terhadap tren populasi, termasuk struktur umur penduduk, rasio ketergantungan, dan kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik yang semakin kompleks (Andrea, 2015). Struktur umur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda akan meningkatkan rasio ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) dan penduduk usia produktif, memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial dan ekonomi (Indonesia UNFPA, 2015). Rasio ketergantungan yang tinggi dapat memberikan tekanan besar pada sistem jaminan sosial dan ekonomi, membutuhkan strategi yang tepat untuk menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, serta perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang efektif (Novian, 2018).

Selain digitalisasi dan penyederhanaan proses administrasi, integrasi data pencatatan kelahiran dengan layanan publik lainnya menjadi langkah penting dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara adil. Sistem pencatatan kelahiran yang terhubung dengan layanan pendidikan dan kesehatan akan memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi individu yang belum memiliki dokumen kependudukan dan memberikan mereka akses terhadap bantuan administratif (Phillips et al., 2015). Dengan pendekatan ini, anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran dapat segera terdata dan mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, kebijakan pencatatan kependudukan yang efektif menjadi kunci dalam perencanaan sosial dan ekonomi jangka panjang. Kota Malang sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia harus mampu mengembangkan sistem administrasi kependudukan yang adaptif terhadap dinamika populasi yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan efisien, diharapkan seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan, dapat memperoleh identitas resmi yang memberikan mereka akses terhadap layanan dasar yang layak. Oleh karena itu, reformasi kebijakan

pencatatan kependudukan harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan kota, guna memastikan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat dikelola secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pencatatan akta kelahiran merupakan instrumen penting dalam mengatur dinamika kependudukan dan memastikan hak-hak sipil warga negara (*Prasetyo & Hamudy, 2016*). Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti hukum keberadaan seseorang dan menjadi dasar akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial (*Romadhona & Kriswibowo, 2024*). Namun, masih terdapat kendala dalam memastikan semua kelahiran terdokumentasi secara tepat waktu dan akurat, mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil dan kesulitan dalam mengakses layanan publik (*Novian, 2018*).

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran juga menjadi aspek yang krusial dalam kebijakan pencatatan kependudukan. Banyak orang tua yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anak mereka karena kurangnya informasi mengenai manfaat memiliki dokumen kependudukan yang sah. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta juga dapat membantu meningkatkan akses terhadap layanan pencatatan kelahiran, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan administrasi kependudukan pemerintah (*Felani, 2017*).

Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan akta kelahiran, akses yang terbatas terhadap layanan administrasi kependudukan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di kantor catatan sipil menjadi penyebab utama permasalahan ini (*Yudhiantara et al., 2023*). Akibatnya, banyak kelahiran yang tidak tercatat, yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil bagi individu yang bersangkutan dan menghambat perencanaan pembangunan yang efektif, mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan (*Kholiq & Wiyani, 2022*). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah akses terhadap layanan administrasi kependudukan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kantor catatan sipil, termasuk pelatihan dan peningkatan teknologi informasi, untuk memastikan terpenuhinya hak-hak sipil dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*Kania et al., 2020*).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara tingkat kelahiran dan dinamika kependudukan di Kota Malang, serta implikasinya terhadap kebijakan pencatatan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber:

a. Data Kependudukan

Data mengenai tingkat kelahiran, struktur usia penduduk, dan dinamika kependudukan lainnya akan diambil dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Data ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tren kelahiran dan perubahan demografis yang terjadi di wilayah tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa data kependudukan yang akurat sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik (*Sari et al., 2021*). Dengan menggunakan data dari BPS, penelitian ini dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah valid dan dapat diandalkan (*BPS, 2022*).

b. Data Pencatatan Kelahiran

Informasi mengenai kebijakan dan pencatatan akta kelahiran diperoleh langsung dari laporan tahunan dan publikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. Data ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan

pencatatan akta kelahiran diterapkan dan dampaknya terhadap tingkat kelahiran. Penelitian oleh Pratiwi dan Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pencatatan kelahiran yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan akta kelahiran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kelahiran. Oleh karena itu, analisis terhadap data ini sangat penting untuk memahami hubungan antara kebijakan dan dinamika kependudukan.

c. Studi Terkait

Artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian akan diidentifikasi melalui pencarian di database jurnal ilmiah. Literatur akademis ini akan memberikan konteks dan kerangka teoritis yang diperlukan untuk analisis. Menurut Hidayati et al. (2022), studi literatur yang komprehensif dapat membantu peneliti dalam memahami tren dan pola yang ada dalam penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi celah penelitian yang perlu diisi. Dengan demikian, pengumpulan data dari studi terkait akan memperkuat argumen dan temuan penelitian ini.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan menelaah dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, dan publikasi dari instansi terkait. Selain itu, literatur akademis yang relevan akan diidentifikasi melalui pencarian di database jurnal ilmiah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah terkini dan relevan. Penelitian oleh Setiawan dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa penggunaan data sekunder yang tepat dapat meningkatkan kualitas penelitian dan memberikan hasil yang lebih akurat.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah strategi penelitian yang menggambarkan sifat atau peristiwa yang terlihat dalam sebuah penelitian daripada menjelaskan kesimpulan umum atau yang diharapkan. Strategi ini melibatkan pengumpulan dan menganalisis data untuk menawarkan tabelan yang jelas dan sistematis dari fitur-fitur tertentu dari masalah penelitian. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu alam untuk mengungkap pola, tren, dan korelasi antar variabel (Kusnadi, 2021). Misalnya, dalam penelitian survei, analisis deskriptif dapat digunakan untuk menentukan karakteristik demografis responden seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dalam penelitian eksperimental, analisis deskriptif berguna untuk melaporkan temuan pengukuran variabel eksperimental seperti rata-rata, median, mode, dan standar deviasi. Analisis deskriptif, yang menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram, membantu para peneliti dan pembaca dalam pemahaman data yang lebih baik dan membuat interpretasi yang lebih tepat dari fenomena yang sedang diselidiki (Widiastuti, 2022).

b. Analisis Korelasi

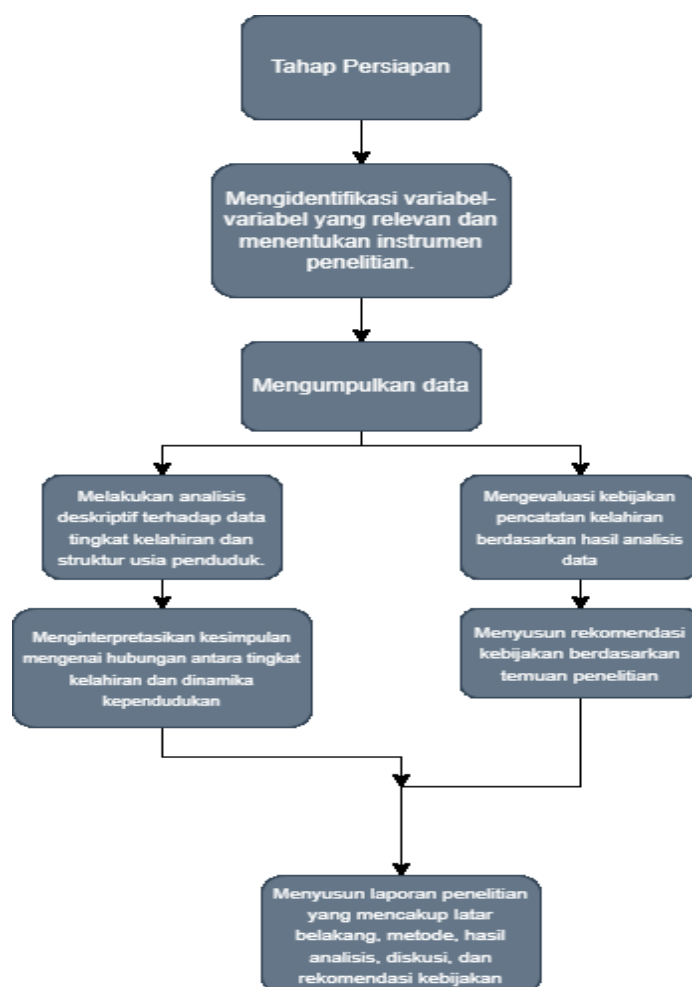
Analisis korelasi adalah pendekatan penelitian untuk menentukan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan atau korelasi antara variabel-variabel ini, serta kekuatan hubungan. Korelasi diukur menggunakan koefisien korelasi, seperti R Pearson, yang berjalan antara -1 dan 1. Angka yang menguntungkan menunjukkan tautan yang menguntungkan, dengan peningkatan variabel lain. Angka 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel ini. Analisis korelasi umumnya digunakan dalam domain seperti psikologi, ekonomi, dan ilmu sosial untuk menganalisis pola korelasi antar variabel (Suharto, 2023). Misalnya, analisis korelasi dapat digunakan dalam

penelitian pendidikan untuk menentukan hubungan antara jumlah jam belajar dan hasil akademik siswa. Korelasi mungkin menyarankan tautan, tetapi tidak menyiratkan sebab-akibat dan akibat. Oleh karena itu, para peneliti harus berhati-hati dalam menafsirkan data korelasi dan memeriksa faktor-faktor lain yang dapat mengubah koneksi (Yulianto, 2021).

c. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah proses penelitian yang menilai, mengevaluasi, dan membuat saran mengenai kebijakan publik atau inisiatif pemerintah. Metode ini menggunakan berbagai alat analitik untuk menilai dampak, efektivitas, efisiensi, dan keadilan suatu kebijakan. Proses analisis kebijakan sering dimulai dengan identifikasi masalah atau masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan. Selain itu, para peneliti mengumpulkan data dan informasi penting dari sumber utama (wawancara dan survei) dan sumber sekunder (dokumen resmi dan makalah studi sebelumnya) (Fitria, 2022). Metode analitik mungkin kualitatif, seperti studi kasus dan analisis naratif, atau kuantitatif, seperti analisis statistik dan model ekonomi. Para peneliti kemudian menilai kebijakan menggunakan kriteria spesifik, seperti biaya, dampak sosial, dan keselarasan dengan tujuan yang dinyatakan. Hasil analisis kebijakan memberikan wawasan terperinci tentang kekuatan dan kekurangan kebijakan yang sedang dipertimbangkan, serta ide-ide untuk perbaikan yang lebih efektif atau kebijakan alternatif. Analisis kebijakan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan publik karena membantu menjamin bahwa kebijakan yang ditetapkan didasarkan pada bukti lengkap dan pertimbangan (Rizki, 2023).

Diagram Alir



Gambar 1. Diagram Alir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat kelahiran dan dinamika populasi di Kota Malang, serta konsekuensi untuk kebijakan akta kelahiran dari 2018 hingga 2022. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, analisis statistik catatan kelahiran resmi, data sensus, dan wawancara dengan otoritas pendaftaran sipil dan penduduk setempat.

Tabel 1. Pencatatan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang 2018-2022

Pencatatan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang 2018-2022					
Kecamatan di Kota Malang	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Blimbing	5,295	6,037	4,349	4,932	4,103
Klojen	2,512	2,396	2,051	2,269	1,924
Kedungkandang	5,534	6,353	5,114	5,678	5,270
Sukun	5,098	5,107	4,440	4,948	4,395
Lowokwaru	4,086	4,281	3,912	4,535	3,572
Total	22,525	24,174	19,866	22,362	19,264

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)									
Kecamatan di Kota Malang	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kedungkandang	95.662	96.684	104.156	96.654	97.657	103.272	192.316	194.341	207.428
Sukun	96.516	97.194	98.090	97.805	98.465	98.210	194.321	195.659	196.300
Klojen	48.833	48.571	45.928	53.751	53.447	48.184	102.584	102.018	94.112
Blimbing	89.209	89.570	90.664	90.895	91.235	91.667	180.104	180.805	182.331
Lowokwaru	96.858	97.397	81.063	99.935	100.462	82.576	196.793	197.859	163.639
Kota Malang	427.078	429.416	419.901	439.040	441.266	423.909	866.118	870.682	843.810

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)					
	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kedungkandang	104.480	104.810	103.595	103.931	208.075	208.741
Sukun	98.171	98.260	98.316	98.429	196.487	196.689
Klojen	45.880	45.836	48.192	48.203	94.072	94.039
Blimbing	90.730	90.803	91.774	91.890	182.504	182.693
Lowokwaru	81.122	81.188	82.673	82.776	163.795	163.964
KOTA MALANG	420.383	420.897	424.550	425.229	844.933	846.126

a. Tingkat Kelahiran:

Tabel 1 menggambarkan bahwa tingkat kelahiran Malang menurun dari 2018 hingga 2022. Data perhitungan ini menggunakan formula *Crude Birth Rate* (CBR), atau tingkat kelahiran yang kasar dengan rumus $CBR = \frac{B}{P} \times 1.000$. Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa tingkat kelahiran mencapai 26 kelahiran per 1.000 orang pada tahun 2018. Tabel 2. Pada tahun berikutnya, tingkat kelahiran meningkat sedikit menjadi 27,7 per 1.000 orang pada tahun 2019. Namun, tahun berikutnya melihat penurunan dramatis menjadi 23,5 Kelahiran per 1.000 populasi pada tahun 2020, diikuti oleh peningkatan statistik normal menjadi 26,4 kelahiran per 1.000 populasi pada tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan lagi menjadi 22,7 kelahiran setiap 1.000 penduduk. Penurunan ini

sebagian besar disebabkan oleh berbagai masalah sosial dan ekonomi, dengan pandemi Covid-19 memiliki dampak terbesar pada banyak aspek kehidupan. Perhitungan Angka Kelahiran Kasar:

$$\text{Tahun 2018} = CBR = \frac{22.525}{866.118} \times 1.000 = 26$$

$$\text{Tahun 2019} = CBR = \frac{24.147}{870.682} \times 1.000 = 27,7$$

$$\text{Tahun 2020} = CBR = \frac{19.866}{843.810} \times 1.000 = 23,5$$

$$\text{Tahun 2021} = CBR = \frac{22.362}{844.933} \times 1.000 = 26,4$$

$$\text{Tahun 2022} = CBR = \frac{19.264}{846.126} \times 1.000 = 22,7$$

b. Dinamika Kependudukan:

Dinamika demografis Kota Malang berubah secara dramatis sepanjang waktu ini. Menurut Tabel 2, populasi keseluruhan naik 10% antara 2018 sampai 2019 dan 2021 sampai 2022, terutama karena migrasi dari wilayah sekitarnya. Banyak orang pindah ke kota untuk mencari kemungkinan karier dan fasilitas yang lebih baik. Fraksi populasi usia produktif (15-64 tahun) juga meningkat, yang mencerminkan pekerjaan yang lebih muda dan lebih dinamis.

c. Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran:

Kebijakan pencatatan akta kelahiran di Malang memiliki sejumlah hambatan. Dari Tabel 3 hingga Tabel 6, statistik kelahiran dari 2018 hingga 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 70% akta kelahiran dicatat terlambat. Penyebab utama adalah kurangnya pengetahuan publik tentang perlunya pendaftaran kelahiran, prosedur yang rumit dan birokrasi, dan terbatas akses ke kantor pendaftaran sipil karena lokasinya di pinggiran kota, yaitu di distrik Kedungkg. Wawancara dengan petugas pendaftaran sipil menunjukkan bahwa batas -batas sumber daya manusia dan teknologi menghalangi efektivitas rekaman kelahiran.

Tabel 4. Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang Tahun 2018

Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang				
Tahun 2018				
No	Kecamatan	Umum	Terlambat	Total
1	Blimbing	1.475	3.820	5.295
2	Klojen	731	1.781	2.512
3	Kedungkandang	1.568	3.966	5.534
4	Sukun	1.665	3.433	5.098
5	Lowokwaru	1.359	2.727	4.086
TOTAL		6.798	15.727	22.525

Tabel 5. Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang Tahun 2019

Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang				
Tahun 2019				
No	Kecamatan	Umum	Terlambat	Total
1	Blimbing	1.598	4.439	6.037
2	Klojen	710	1.686	2.396
3	Kedungkandang	1.711	4.642	6.353
4	Sukun	1.695	3.412	5.107
5	Lowokwaru	1.412	2.869	4.281
TOTAL		7.126	17.048	24.174

Tabel 6. Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang Tahun 2020

Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang				
Tahun 2020				
No	Kecamatan	Umum	Terlambat	Total
1	Blimbing	1.367	2.982	4.439
2	Klojen	590	1.461	2.051
3	Kedungkandang	1.478	3.636	5.114
4	Sukun	1.496	2.944	4.440
5	Lowokwaru	1.344	2.568	3.912
TOTAL		6.275	13.591	19.866

Tabel 7. Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang Tahun 2021

Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Kota Malang				
Tahun 2021				
No	Kecamatan	Umum	Terlambat	Total
1	Blimbing	1.496	3.426	4.922
2	Klojen	651	1.618	2.269
3	Kedungkandang	1.617	4.061	5.678
4	Sukun	1.491	3.457	4.948
5	Lowokwaru	1.370	3.165	4.535
TOTAL		6.625	15.727	22.352

Penelitian ini menemukan hubungan yang substansial antara tingkat kelahiran, dinamika populasi, dan kebijakan mencatat akta kelahiran di Kota Malang dari 2018 hingga 2022. Penurunan angka kelahiran, terutama antara tahun 2020 dan 2022, diantisipasi dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang berubah secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Menurut penelitian oleh Sari et al. (2021), pandemi telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada keputusan reproduksi masyarakat, di mana banyak pasangan yang menunda atau membatalkan rencana untuk memiliki anak. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa krisis kesehatan global dapat mempengaruhi perilaku reproduksi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Kumar & Singh, 2020).

Dinamika populasi di Malang juga menunjukkan pergeseran demografis yang cukup besar, seperti urbanisasi yang cepat dan migrasi masuk. Urbanisasi yang pesat ini tidak hanya meningkatkan jumlah penduduk, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi infrastruktur dan layanan pemerintah, termasuk sistem pendaftaran kelahiran. Menurut penelitian oleh Prasetyo et al. (2022), peningkatan populasi perkotaan sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan layanan publik, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendaftaran kelahiran. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap perubahan demografis yang terjadi.

Populasi yang semakin muda dan produktif di Malang juga membutuhkan penyesuaian dalam kebijakan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan layanan yang efisien dan mudah diakses. Penelitian oleh Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa generasi muda lebih cenderung mencari layanan yang cepat dan berbasis teknologi, sehingga penting bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan kebutuhan ini. Kebijakan yang tidak responsif terhadap perubahan ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan menurunnya tingkat partisipasi dalam sistem pendaftaran kelahiran.

Tantangan dalam kebijakan mencatat akta kelahiran menyoroti perlunya revisi untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas. Upaya penting yang harus dilakukan termasuk prosedur penyederhanaan, mendigitalkan layanan perekaman, dan meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya pendaftaran kelahiran. Menurut penelitian oleh Widiastuti et al. (2020), digitalisasi layanan pendaftaran dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan

mempercepat proses pendaftaran, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlayani. Selain itu, upaya pendidikan dan pelatihan publik untuk pejabat pendaftaran sipil juga diharuskan untuk menjamin bahwa setiap kelahiran secara akurat dan tepat waktu terdaftar (Hidayati & Sari, 2021).

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kelahiran dan dinamika populasi memiliki implikasi yang signifikan untuk kebijakan merekam akta kelahiran. Kota Malang dapat mempromosikan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan dengan meningkatkan sistem registrasi sipil dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti. Penelitian oleh Setiawan et al. (2022) menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang lebih baik dalam pendaftaran kelahiran tidak hanya akan meningkatkan angka pendaftaran, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas di Kota Malang.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara tingkat kelahiran dan dinamika populasi di Kota Malang, serta konsekuensi untuk kebijakan perekaman akta kelahiran dari 2018 hingga 2022. Studi ini menunjukkan hubungan substansial antara tingkat kelahiran, dinamika populasi, dan Kebijakan merekam akta kelahiran di Kota Malang. Selama periode 2018-2022. Penurunan angka kelahiran, terutama pada tahun 2020 dan 2022, kemungkinan besar dipengaruhi oleh perubahan drastis dalam situasi sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sebagai bagian dari peningkatan dinamika urbanisasi populasi, banyak warga negara pindah ke daerah metropolitan untuk mencari prospek dan fasilitas kerja yang lebih baik. Fraksi populasi usia produktif (15-64 tahun) juga meningkat, yang mencerminkan pekerjaan yang lebih muda dan lebih dinamis. Dalam hal pendaftaran kebijakan akta kelahiran, sekitar 70% dari akta kelahiran dicatat terlambat. Penyebab utama termasuk kurangnya pemahaman publik tentang kebutuhan pendaftaran kelahiran, prosedur yang sulit dan birokrasi, dan akses terbatas ke Kantor Registri Sipil.

REFERENSI

- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Achadi, E. L., Taher, A., ... & Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75-102.
- Andrea, E. P. (2015). Study on impact of urbanization and rapid urban expansion in Java and Jabodetabek megacity, Indonesia.
- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKKBN) Pemerintah Kota Malang. (2020). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *bkkbn.go.id*. Diakses pada 29 Mei 2024.
- Bennouna, C., Feldman, B., Usman, R., Adiputra, R., Kusumaningrum, S., & Stark, L. (2016). Using the three delays model to examine civil registration barriers in Indonesia. *PLoS One*, 11(12), e0168405.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. (2023). Laporan tahunan Dispendukcapil Kota Malang. Layanan Kependudukan. <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>. Diunduh pada 29 Mei 2024.
- Felani, M. (2017). Jakarta Urbanization Control in Human Rights Perspective. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 63-72.
- Firman, T. (2016). Demographic patterns of Indonesia's urbanization, 2000–2010: Continuity and change at the macro level. *Contemporary demographic transformations in China, India and Indonesia*, 255-269.
- Fitria, E. (2022). *Analisis kebijakan publik dalam penanganan masalah sosial: Metode dan*

- pendekatan*. Jurnal Kebijakan Publik, 28(1), 45-62.
- Haryanto, T., & Suryani, N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran di Kota Malang. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 115-130.
- Hidayati, R., Lestari, S., & Rahmawati, T. (2022). *Studi literatur dalam penelitian sosial: Pentingnya memahami tren dan pola*. Jurnal Ilmu Sosial, 16(3), 201-218.
- Hutasoit, I. (2023). POPULATION GROWTH IN BATAM MUNICIPALITY AS THE FRONTIER AND OUTERMOST REGION AT THE BORDER BETWEEN INDONESIA-SINGAPORE/MALAYSIA. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population)*, 12(2).
- Indonesia, U. N. F. P. A. (2015). Urbanization in Indonesia.
- Kania, I., Alamanda, D. T., Nurbudiwati, N., & Fauzan, D. H. (2020). The influence of birth certificate application process service toward public satisfaction in the population and civil registration agency of Garut Regency Indonesia. In *Advances in Business, Management and Entrepreneurship* (pp. 132-135). CRC Press.
- Kusnadi, M. (2021). *Analisis deskriptif dalam penelitian sosial: Metode dan aplikasinya*. Jurnal Metodologi Penelitian, 20(2), 101-120.
- Kholiq, K. S., & Wiyani, W. (2022). Implementation of Population Administration at the Malang Regency Population and Civil Registration Office, Indonesia.
- Novian, A. K. (2018). *Preparation Strategy In The Change Of Birth Certificate System Based On Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Study at Department Population and Civil Registration of North Jakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Phillips, D. E., AbouZahr, C., Lopez, A. D., Mikkelsen, L., De Savigny, D., Lozano, R., ... & Setel, P. W. (2015). Are well functioning civil registration and vital statistics systems associated with better health outcomes?. *The Lancet*, 386(10001), 1386-1394.
- Prasetyo, H., & Hamudy, M. I. A. (2016). Increasing the scope of birth and death registration: issues and challenges. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 13-26.
- Pratiwi, S., & Rahmawati, D. (2020). *Efektivitas kebijakan pencatatan kelahiran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 35-50.
- Purwanto, E. (2022). Dinamika kependudukan dan kebijakan pencatatan kelahiran di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 55-70.
- Rizki, M. (2023). *Analisis kebijakan dalam pemerintahan dan dampaknya terhadap masyarakat*. Jurnal Analisis Kebijakan, 19(1), 88-104.
- Romadhona, L. D., & Kriswibowo, A. (2024). Strategies for Improving Population Administration Services at the Tuban District Population and Civil Registration Office. *ARISTO*, 13(1), 56-79.
- Saputra, D., & Rahman, K. (2023). Synergy Strengthening Program to Support the Success of Quality Village Programs in East Java (Study of Malang City and Tuban District). *Demography and social economy*, 54(4), 115-134.
- Sari, R., et al. (2021). *Perencanaan kependudukan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik*. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 23(4), 210-225.
- Suharto, S. (2023). *Analisis korelasi dalam penelitian sosial dan ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 22(1), 58-73.
- Widiastuti, S. (2022). *Pendekatan analisis deskriptif dalam penelitian ilmu sosial dan alam*. Jurnal Ilmu Pengetahuan, 17(3), 115-128.
- Yudhiantara, I., Antarini, L., Putra, A. P., & Putu, I. (2023). Analysis of E-Governance Program “Badung Smart City” at the Department of Population and Civil Registry Office of Badung District, Bali, Indonesia. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 12(7), 1119-1129.
- Yulianto, D. (2021). *Analisis korelasi dan interpretasi data dalam penelitian pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Penelitian, 29(2), 90-105.

Ziegenhain, P. (2021). Getting old before getting rich (and not fully realizing it): Premature ageing and the demographic momentum in Southeast Asia. In *Global Political Demography: The Politics of Population Change* (pp. 167-193). Cham: Springer International Publishing.